



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDHITYA WAHAB

2. Jabatan : KEPALA DINAS

3. NHK : **907795**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.135.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA HALMAHERA BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 160.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KAB / KOTA HALMAHERA BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 110.000.000
- 3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/400 m2 di KAB / KOTA HALMAHERA BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 170.000.000
- 4. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/200 m2 di KAB / KOTA HALMAHERA BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 85.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/35 m2 di KAB / KOTA
 HALMAHERA BARAT, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 25.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/30 m2 di KAB / KOTA HALMAHERA BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 70.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA HALMAHERA BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 240.000.000
- 8. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/25 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 2.000 m2/2.000 m2 di KAB / KOTA
 HALMAHERA BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

45.000.000





MOBIL, SUZUKI AERIO DX MT 2008 NO. BPKB. P-03944663
 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	40.640.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	Kar Kar
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	29.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	KPK KPK
Sub Total	Rp.	2.249.640.000
III. HUTANG	Rp.	76.523.820
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.173.116.180

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.